

## Berita Lingkungan Hidup

### Tata Ruang Daerah Diabaikan

CIBODAS, KOMPAS - Pemerintah daerah masih mengabaikan kewajibannya untuk membuat rencana tata ruang dan melaksanakannya secara konsisten. Justru yang terjadi, banyak daerah yang mengeluarkan izin untuk berbagai kegiatan yang merusak lingkungan, termasuk izin kuasa pertambangan.

Menjelang pemilihan kepala daerah, biasanya perizinan semakin banyak dikeluarkan, termasuk izin kuasa pertambangan batu bara. Di sisi lain, kearifan lokal soal pengelolaan lingkungan sering kali diabaikan.

Demikian benang merah diskusi bertajuk "Kita Peduli Bumi" yang diselenggarakan Organisasi Pencinta Lingkungan Vanaprastha bekerja sama dengan Taman Nasional Gunung Gede Paranggo, di Cibodas, Jumat (23/4). Tampil sebagai narasumber Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Meutia Hatta Swasono, Ketua Umum Vanaprastha Adhyaksa Dault, anggota pendiri Mapala Universitas Indonesia Herman Lantang, Wakil Kepala Taman Nasional Gunung Gede Paranggo Indra Eksplorasia, dan artis pencinta lingkungan Olivia Zalianty.

Gusti Muhammad Hatta mengatakan, berbagai kerusakan lingkungan juga dipicu karena daerah belum mempunyai tata ruang sehingga belum jelas peruntukan lahannya.

"Dari 33 provinsi baru 5 provinsi yang sudah menyelesaikan tata ruangnya. Akibat tata ruang tidak ada, daerah dengan mudahnya menyetujui suatu investasi meski itu harus mengorbankan lingkungan," kata Gusti Muhammad Hatta.

#### Investor sawit

Gusti juga menyoroti kawasan yang disebut Areal Penggunaan Lain (APL). "Di kawasan itu ternyata hutannya lebat dan kayunya besar-besar. Jauh lebih lebat dibandingkan kawasan hutan lindung," kata Gusti.

Ironisnya, di kawasan itu izin untuk perkebunan kelapa sawit dikeluarkan. "Belum mulai beroperasi saja, investor sawit sudah untung dari hasil penjualan kayu yang melimpah," kata Gusti.

Tak ada investor sawit yang mau membuka perkebunan sawit di lahan kritis yang tanpa pohon lebat. Padahal, lahan kritis di Indonesia sangat luas.

"Karena itu APL sebaiknya dijadikan saja sebagai hutan lindung," ujarnya.

Meutia Hatta Swasono mengatakan, masalah konservasi harus terus digaungkan ke semua kalangan. Pola pikir yang cenderung mengeksploitasi hutan untuk kepentingan ekonomis harus diluruskan.

"Memanfaatkan hutan harus kembali pada kearifan lokal. Kearifan lokal itu intinya bagaimana tidak mengeksploitasi hutan dan lingkungan secara berlebihan," ujarnya.

Adhyaksa Dault mengatakan, bencana alam akan terus terjadi jika pemerintah tidak tegas menyelamatkan lingkungan. Keuntungan ekonomis dari mengeksploitasi alam, ternyata tidak seberapa jika dibandingkan ongkos yang harus dikeluarkan akibat rusaknya lingkungan. (NAL)